RENCANA KERJA TAHUN 2024



DINAS KOPERASI, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

KABUPATEN ASAHAN

TAHUN 2023

PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN
DINAS KOPERASI PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
JL. PROF. H. M. YAMIN, S.H NO. 44 TEL/FAX : (0623) 41406
Website : www.diskopdagin.asahankab.go.id | Email : diskopdagin@asahankab.go.id
KISARAN – 21224

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN ASAHAN

NOMOR : 000.7.2/1344/VIII/2023

TENTANG

RENCANA KERJA DINAS KOPERASI, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2024

KEPALA DINAS KOPERASI, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN ASAHAN

Menimbang : bahwa dalam rangka penyusunan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Asahan Tahun 2024, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Asahan tentang Rencana Kerja (Renja) Badan Dinas Koperasi, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Asahan Tahun 2024;

Mengingat :

1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional

Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

5. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah,

Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114)

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447)

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Nomor 4);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Nomor 5);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Asahan (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Nomor 6), sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah

Kabupaten Asahan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Asahan (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Nomor 2);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Asahan Nomor 3);

18. Peraturan Bupati Asahan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Musyawarah Perancanaan Pembangunan Secara Elektronik (Berita Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2016 Nomor 39);

19. Peraturan Bupati Asahan Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2021 Nomor 41);

20. Peraturan Bupati Asahan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2023 Nomor 22);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN ASAHAN TENTANG RENCANA KERJA (RENJA) BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2024.

KESATU : Renja Dinas Koperasi, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Asahan dimaksud, tertuang dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Renja Dinas Koperasi, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Asahan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU disusun dengan Sistematika sebagai berikut :

1. BAB I. PENDAHULUAN.
2. BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU.
3. BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.
4. BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
5. BAB V. PENUTUP

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kisaran
Pada tanggal : 12 Juli 2023.

KEPALA DINAS KOPDAGIN
KABUPATEN ASAHAN,

Drs. ILHAM, MM
Pembina TK. I
Nip. 197201716 199303 1 004

Tembusan :
Bupati Asahan sebagai laporan

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga Rencana Kerja Dinas Koperasi, Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2024 ini dapat diselesaikan. Rencana Kerja (RENJA) ini disusun sebagai perwujudan kewajiban dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Dinas Koperasi, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Asahan pada tahun 2024 mendatang berdasarkan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan, guna mewujudkan Visi dan Misi dalam rangka meningkatkan pelayanan di bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian kepada masyarakat.

Pada kesempatan ini kami sampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Rencana Kerja OPD Tahun 2024 ini. Semoga semua rencana kerja yang telah ditetapkan ini dapat dilaksanakan sesuai dengan harapan kita semua.

Demikianlah yang dapat kami sampaikan, kiranya Allah SWT senantiasa melindungi dan meridhoi segala aktifitas kita semua sehingga dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Kisaran, 12 Juli 2023

KEPALA DINAS KOPERASI, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN ASAHAN,

PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN
DINAS KOPERASI, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

Drs. ILHAM, MM.
PEMBINA TK. I
NIP. 19720716 199303 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum 2

1.3 Maksud dan Tujuan 5

1.4 Sistematika Penulisan 5

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU 7

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Koperasi, Perdagangan dan Perindustrian kabupaten Asahan 7

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Asahan 8

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi 8

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 9

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 10

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 11

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Propinsi 11

3.2 Tujuan dan Sasaran 12

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Program dan Kegiatan 15

BAB V PENUTUP 20

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu dan menyeluruh. Rencana pembangunan tersebut sifatnya berjenjang, yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah rencana pembangunan tersebut berupa Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra-OPD).

Sejalan dengan hal tersebut di atas, maka setiap OPD wajib membuat dan memiliki Rencana Kerja OPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra OPD dan mengacu kepada RKPD. Rencana Kerja OPD yang disebut juga Renja–OPD adalah dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk periode satu tahun.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Asahan tahun 2024 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, penyusunannya dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan Rancangan Renja OPD.

Dinas Koperasi, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Asahan sebagai Organisasi Perangkat Daerah, untuk tahun 2023 menyusun Rencana Kerja Dinas Koperasi, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Asahan tahun 2024. Renja OPD merupakan dokumen rencana pembangunan OPD yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Rencana Kerja Dinas Koperasi, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Asahan tahun 2024, merupakan rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan visi Pemerintah Kabupaten Asahan tahun 2021 – 2026 seperti yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Asahan Tahun 2021 – 2026 yaitu:

"Masyarakat Asahan Sejahtera yang Religius dan Berkarakter"

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Asahan tahun 2024 akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam pengusulan program dan kegiatan tahun 2024 yang merupakan Prioritas Pembangunan Daerah, yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah.

1.2. Landasan Hukum

Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Koperasi, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Asahan Tahun 2024 adalah :

1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

5. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114)

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan

dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447)

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Nomor 4);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Nomor 5);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Asahan (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Nomor 6), sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Asahan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Asahan (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Nomor 2);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Asahan Nomor 3);

18. Peraturan Bupati Asahan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Musyawarah Perancanaan Pembangunan Secara Elektronik (Berita Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2016 Nomor 39);

19. Peraturan Bupati Asahan Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2021 Nomor 41);

20. Peraturan Bupati Asahan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2023 Nomor 22);

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Dinas Koperasi, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Asahan tahun 2024 dimaksudkan menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Dinas Koperasi, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Asahan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2024.

Tujuannya adalah:

1. Sebagai pedoman atau acuan bagi aparatur Dinas Koperasi, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Asahan dalam melaksanakan kegiatan tahun 2024 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
2. Tersusunnya Renja ini adalah tujuan dalam pencapaian Visi dan Misi di bidang Koperasi, Perdagangan dan Perindustrian yang tertuang dalam rencana strategis maupun langkah-langkah kegiatan dapat dilaksanakan.
3. Merumuskan program dan kegiatan pembangunan Dinas Koperasi, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Asahan selama tahun 2024.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Kerja Dinas Koperasi, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Asahan Tahun 2024 disusun sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN;

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja OPD yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan,

BAB II HASIL EVALUASI PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU;

Bab ini menguraikan tentang capaian kerja OPD tahun lalu, antara lain berisi evaluasi pelaksanaan renja OPD tahun lalu dan capaian renstra OPD, analisis kinerja pelayanan OPD, Isu-isu penting

penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD, review terhadap rancangan awal RKPD dan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH;

Berisi tentang penjabaran implementasi dari pernyataan misi dan mengacu pada telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran renja OPD serta program dan kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisi tentang penjelasan dan penjabaran dari program dan kegiatan dan prakiraan pendanaan serta rencana kegiatan tahun berikutnya.

BAB VI PENUTUP;

berisi harapan kepala OPD terhadap pedoman kerja ke depan serta peningkatan pelayanan OPD.

BAB II

EVALUASI PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Koperasi, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Asahan

Keberhasilan yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan pada Dinas Koperasi, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Asahan pada Tahun 2022 ditentukan dari hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang disesuaikan dengan Renja tahun bersangkutan dan APBD Kabupaten Asahan.

Pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Koperasi, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Asahan Tahun Anggaran 2022 terdiri dari **11** program, **17** kegiatan dan **34** sub-kegiatan. Besaran anggaran yang dikelola adalah sebesar **Rp. 8.900.433.357,00** dan sampai keadaan bulan Desember 2020 yang terealisasi sebesar **Rp. 8.317.507.239,00** atau **93,45 %.** Sisa anggaran sekitar **6,55 %**, dan secara keseluruhan kegiatan tercapai 100 %.

Capaian renstra Dinas Koperasi, Perdagangan dan Perindustrian untuk tahun 2022 dapat dilihat pada capaian indikator kinerja tahun 2022, yaitu :

NO	Indikator	Capaian 2022	Target RPJMD	Persentase (%)
1	Pertumbuhan Wirausaha Baru	3,81 %	4,16 %	91,59 %
2	Pertumbuhan sektor perdagangan dalam PDRB	3,95 %	2,1 %	188,10 %
3	Pertumbuhan sektor industri dalam PDRB	1,89 %	4,11 %	45.99 %

2.2. *Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Asahan*

Gambaran umum Pelayanan Dinas Koperasi, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Asahan meliputi :

1. Pelayanan di Bidang Koperasi

   Adalah pelayanan terhadap masyarakat pelaku koperasi yang berkaitan dengan usaha koperasi, kebijakan teknis, pembinaan kelembagaan koperasi, pembiayaan dan simpan pinjam serta pengawasan dan pengendalian koperasi.

2. Pelayanan di Bidang UKM

   Adalah pelayanan terhadap masyarakat dan pelaku usaha yang berkaitan dengan penumbuhan usaha mikro, kecil dan menengah, pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah dan permodalan dan jasa keuangan, juga melakukan pembinaan dan penyaluran Dana Pinjaman Bergulir kepada masyarakat pelaku usaha (Usaha Mikro Kecil dan Menengah).

3. Pelayanan di Bidang Perdagangan

   Adalah pelayanan terhadap masyarakat dan pelaku usaha yang berkaitan dengan Kelembagaan dan Stabilisasi Harga, Pengembangan Ekspor serta Pembinaan dan Pengawasan Usaha Perdagangan.

4. Pelayanan di Bidang Industri

   Adalah pelayanan terhadap masyarakat dan pelaku usaha yang berkaitan dengan pengembangan industri, izin usaha industri dan pengelolaan sistem informasi industri.

2.3. *Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi*

Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Koperasi, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Asahan dalam berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat, masih tidak terlepas dari isu – isu yang memerlukan kecermatan dalam penanggulangannya seperti

globalisasi, transparansi, pemerintahan yang bersih dan berwibawa, tingkat pengangguran, kepedulian terhadap lingkungan, kemajuan Ilmu dan Teknologi, kemiskinan, Perlindungan Masyarakat (Konsumen) dan akuntabilitas kinerja aparatur.

Dengan globalisasi dan penggunaan IPTEK yang sangat pesat berkembang, saat ini beberapa isu – isu strategis masih merupakan permasalahan yang tidak boleh terlepas dalam menjalankan kebijakan di bidang Koperasi, Perdagangan dan Perindustrian antara lain :

1. Rendahnya kualitas dan kemandirian koperasi sebagai basis kekuatan ekonomi masyarakat
2. Kualitas produk UMKM belum maksimal sehingga daya saingnya lemah
3. Belum optimalnya penataan sarana dan prasarana perdagangan
4. Rendahnya kualitas produk industri

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Pada Renstra Dinas Koperasi, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Asahan, rancangan awal RKPD sebagaimana yang tercantum dalam RPJMD bahwa Rencana kerja Dinas Koperasi, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Asahan selama 5 (Lima) Tahun Mencakup 14 (empat belas) program. Adapun program kerja untuk tahun 2024 sesuai dengan rancangan awal RKPD mencakup 14 (empat belas) Program, yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi
3. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi
4. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian
5. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)
6. Program Pengembangan UMKM
7. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan

8. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
9. Program Pengembangan Ekspor
10. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen
11. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
12. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
13. Program Pengendalian Izin Usaha Industri
14. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nassional

14 (empat belas) program kerja tersebut mencakup 22 (dua puluh dua) kegiatan dan 43 (empat puluh tiga) sub kegiatan yang telah diusulkan dan dalam proses pembahasan. Sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada serta kebutuhan yang ada kegiatan akan dilaksanakan sesuai dengan apa yang telah direncanakan, kecuali masalah ketepatan waktu.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program dan kegiatan yang diajukan masyarakat dalam Musrenbang di Tingkat Kabupaten telah diupayakan untuk ditampung dalam program dan kegiatan Dinas, namun pelaksanaan kegiatan tersebut tergantung dengan sumber dana yang tersedia.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Arah kebijakan nasional pada sektor Koperasi dan UKM adalah untuk meningkatkan daya saing Koperasi dan Usaha Mikro sehingga mampu tumbuh menjadi usaha yang berkelanjutan dengan skala yang lebih besar. Kebijakan tersebut dilaksanakan antara lain melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan kelembagaan usaha serta peningkatan akses pembiayaan.

Arah kebijakan nasional pada sektor Perdagangan meningkatkan aktivitas perdagangan melalui pembenahan sistem distribusi dan iklim usaha perdagangan serta penguatan perlindungan konsumen dan standarisasi produk lokal.

Mengacu pada kebijakan tersebut di atas maka arah dan kebijakan Dinas Koperasi, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Asahan adalah :

- **Sektor Koperasi Dan Usaha Mikro**

1. Meningkatkan kualitas SDM koperasi melalui pelatihan manajemen dan akuntansi
2. Pemeringkatan dan penilaian kesehatan koperasi serta pembubaran koperasi
3. Pengembangan masyarakat sadar koperasi
4. Fasilitasi pelatihan dan bimbingan teknis bagi pelaku usaha mikro
5. Meningkatkan kualitas mutu produk usaha mikro
6. Pengembangan desain dan kemasan produk usaha mikro
7. Mengembangkan akses pemasaran melalui digitalisasi produk usaha mikro
8. Fasilitasi Kerjasama antar koperasi dan usaha mikro dengan Lembaga pemerintah maupun swasta melaui kegiatan magang, studi banding dan temu usaha
9. Fasilitasi permodalan bagi koperasi dan usaha mikro melalui

penyaluran dana pinjaman bergulir

- **Sektor Perdagangan**

1. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana perdagangan
2. Menjaga ketersediaan dan kestabilan harga bahan pokok penting
3. Meningkatkan potensi sumber daya dan pembinaan komoditi ekspor dan kegiatan promosi
4. Meningkatkan pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan metrologi legal
5. Peningkatan penggunaan produk dalam negeri

- **Sektor Perindustrian**

1. Memfasilitasi peningkatan unit usaha dan kemitraan usaha industri
2. Memfasiltasi ketersediaan sarana dan prasarana industri
3. Memfasilitasi peningkatan kualitas produk industri unggulan
4. Meningkatkan pembinaan dan pelatihan terhadap pelaku usaha industri berbasis komoditas unggulan daerah.

3.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Kebijakan dan Strategi pengembangan Koperasi, Perdagangan dan Perindustrian di Kabupaten Asahan diarahkan dengan mengacu kepada visi Pemerintah Kabupaten Asahan tahun 2021 – 2026 yaitu :

"Masyarakat Asahan Sejahtera yang Religius dan Berkarakter"

Dari **visi** tersebut maka **misi** yang telah ditetapkan adalah misi kedua, yaitu:

- Meningkatkan kerjasama antar pelaku usaha dan pemanfaatan potensi unggulan daerah dalam rangka mendorong perekonomian daerah.

Tujuan yang telah dirumuskan untuk dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan adalah :

- Meningkatkan daya dukung dan nilai tambah potensi unggulan daerah sektor koperasi, usaha mikro dan perdagangan

Dalam kaitannya dengan tujuan yang telah ditetapkan maka diperlukan sasaran yang harus dicapai Dinas Koperasi, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Asahan dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Adapun sasarannya adalah :

- Meningkat dan berkembangnya koperasi dan usaha
- Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan bagi perekonomian
- Meningkatnya Pertumbuhan industri berbasis komoditas unggulan daerah

TUJUAN DAN SASARAN DINAS KOPERASI, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2024

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA SASARAN (%)
1	2	3	4	5
1.	Meningkatkan daya dukung dan nilai tambah potensi unggulan daerah sektor koperasi, usaha mikro dan perdagangan	Meningkat dan berkembangnya koperasi dan usaha mikro	Tingkat pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi	100 %
			Persentase Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam yang sehat	30,03 %
			Persentase SDM Koperasi terlatih	17,20 %
			Persentase Partisipasi Usaha Mikro	1,197 %
			Persentase Usaha Mikro yang berkembang menjadi Usaha Kecil	0,080 %
		Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan bagi perekonomian	Persentase Sarana Distribusi Perdagangan yang dikelola dengan baik	32,26%
			Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	27,81%
			Persentase Produk Ekspor Unggulan	100%
			Persentase Pelaku Usaha yang memenuhi Uji Metrologi Legal	100%
			Cakupan Fasilitasi Pemasaran Produk Lokal	100%
		Meningkatnya Pertumbuhan industri berbasis komoditas unggulan daerah	Pertumbuhan Industri Baru	0,13 %
			Persentase Perizinan Usaha Industri	100 %
			Cakupan Layanan Sistem Informasi Industri Nasional	21 %

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Program dan Kegiatan

Disamping berdasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Asahan tahun 2021 - 2026 serta mengacu pada Renstra Dinas Koperasi, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Asahan Tahun 2021 – 2026, dalam pelaksanaan program dan kegiatan juga berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Sehubungan dengan hal tersebut maka pada tahun 2024 Dinas Koperasi, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Asahan merencanakan 14 program, 22 kegiatan dan 43 sub-kegiatan, yaitu :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH, dengan kegiatan :
   1) **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**, yaitu :
      a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
      b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
   2) **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**, yaitu :
      b. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
   3) **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**, yaitu :
      a. Pengadaan Pakaian Dinas Berserta Atribut Kelengkapannya.
   4) **Administrasi Umum Perangkat Daerah**, yaitu :
      a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.
      b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
      c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor.
      d. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan.

e. Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan.
f. Penyediaan Bahan/Material.
g. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

5) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, yaitu :

a. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.
b. Pengadaan Mebel.
c. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, yaitu

d. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
e. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, yaitu :

a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.
b. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.
c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

2. PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI, dengan kegiatan :

1) **Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam daerah Kabupaten/Kota**, yaitu

a. Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotannya Daerah Kabupaten/Kota

3. PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI, dengan kegiatan :

1) **Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**, yaitu.

a. Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi

Kewenangan Kabupaten/Kota

4. PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN, dengan kegiatan :
   1) **Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota**, yaitu :
      a. Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi.
5. PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM), dengan kegiatan :
   1) **Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan**, yaitu :
      a. Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro.
      b. Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro.
      c. Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro.
      d. Penyusunan Basic Data Usaha Mikro.
6. PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM, dengan kegiatan :
   1) **Pengembangan Usaha Mikro Dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil**, yaitu :
      a. Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia serta Desain dan Teknologi.
7. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN, dengan kegiatan :
   1) **Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan**, yaitu
      a. Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan.
      b. Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan.
   2) **Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya**, yaitu :
      a. Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan.
8. PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING, dengan kegiatan :

1) **Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota**, yaitu :
   a. Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi Dalam Sistem Informasi Perdagangan.
   b. Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota.
2) **Pengawasan Pupuk dan Pestisida Besubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**, yaitu :
   a. Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Perstisida Bersubsidi.
   b. Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi.

9. PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR, dengan kegiatan :
   1) **Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan Yang Terdapat Pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**, yaitu :
      a. Pameran Dagang Nasional.
      b. Peningkatan Citra Produk Ekspor.
10. PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN, dengan kegiatan :
   1) **Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan**, yaitu :
      a. Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang.
      b. Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal.
11. PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI, dengan kegiatan :
   1) **Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri**, yaitu :
      a. Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri Di Tingkat Kabupaten/Kota.
12. PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI, dengan kegiatan :
   1) **Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota**, yaitu :

a. Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota.
b. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri.
c. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri.
d. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat.

13. PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI, dengan Kegiatan :

1) Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota, yaitu

a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha Sektor Perindustrian yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota.

14. PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL, dengan kegiatan :

1) **Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota**, yaitu :

a. Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri sera Data Lain Lingkup Kabupaten/KotaMelalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).

BAB V

P E N U T U P

Rencana Kerja Dinas Koperasi, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Asahan yang didalamnya mencakup Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan yang disusun ini agar dapat dipakai sebagai pedoman atau acuan dalam mencapai tujuan pembangunan di bidang Koperasi, Perdagangan dan Perindustrian.

Adanya Renja ini diharapkan agar Dinas Koperasi, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Asahan serta seluruh aparatnya dapat melaksanakan tugas secara terarah, bertahap dan berkesinambungan dengan tetap mengadakan koordinasi dengan instansi terkait dan untuk mengantisipasi tuntutan masyarakat akan pelayanan yang bersifat cepat, akurat, transparan dan adil.

Kisaran, 12 Juli 2023

KEPALA DINAS KOPERASI, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN ASAHAN,

PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN
DINAS KOPERASI, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

Drs. ILHAM, MM.
PEMBINA TK. I
NIP. 19720716 199303 1 004

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS KOPERASI, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KAB. ASAHAN
TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS KOPERASI, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN						**10.404.751.537,32**							**10.151.893.593,83**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**6.893.524.964,00**							**6.786.631.214,00**	
	2.17	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**						**6.893.524.964,00**							**6.786.631.214,00**	
1.	**2.17.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase Tingkat Tertib Administrasi Layanan Pemerintahan***	-			**100 %**	**5.993.524.964,00**						-	**5.871.631.214,00**	
	2.17.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* *Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara* *Jumlah laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	-			7 dokumen 63 unit 2 laporan	36.000.000,00			-	3. Ekonomi Mandiri	-	-	37.000.000,00	DINAS KOPERASI, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	16.000.000,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Ekonomi Mandiri	-		17.000.000,00	DINAS KOPERASI, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				23 Laporan	20.000.000,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Ekonomi Mandiri	-		20.000.000,00	DINAS KOPERASI, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase pelaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah*	-			100 %	4.712.981.214,00			-	3. Ekonomi Mandiri	-	-	4.712.981.214,00	DINAS KOPERASI, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				528 Orang/bulan	4.712.981.214,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Ekonomi Mandiri	-		4.712.981.214,00	DINAS KOPERASI, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah*	-			100 %	20.143.750,00			-	3. Ekonomi Mandiri	-	-	20.250.000,00	DINAS KOPERASI, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	20.143.750,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Ekonomi Mandiri	-		20.250.000,00	DINAS KOPERASI, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah*	-			100 %	226.000.000,00			-	3. Ekonomi Mandiri	-	-	246.000.000,00	DINAS KOPERASI, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	6.000.000,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Ekonomi Mandiri	-		7.000.000,00	DINAS KOPERASI, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	35.000.000,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Ekonomi Mandiri	-		35.000.000,00	DINAS KOPERASI, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	25.000.000,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Ekonomi Mandiri	-		30.000.000,00	DINAS KOPERASI, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	20.000.000,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Ekonomi Mandiri	-		22.000.000,00	DINAS KOPERASI, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Ekonomi Mandiri	-		22.000.000,00	DINAS KOPERASI, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				3 Paket	50.000.000,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Ekonomi Mandiri	-		50.000.000,00	DINAS KOPERASI, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	70.000.000,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Ekonomi Mandiri	-		80.000.000,00	DINAS KOPERASI, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Barang milik daerah (BMD) penunjang urusan pemerintahan daerah*	-			5 BMD	250.000.000,00			-	3. Ekonomi Mandiri	-	-	105.000.000,00	DINAS KOPERASI, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				4 Unit	190.000.000,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Ekonomi Mandiri	-		0,00	DINAS KOPERASI, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				10 Unit	10.000.000,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Ekonomi Mandiri	-		50.000.000,00	DINAS KOPERASI, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				6 Unit	50.000.000,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Ekonomi Mandiri	-		55.000.000,00	DINAS KOPERASI, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan* *Jumlah laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	-			12 bulan 2 laporan	578.400.000,00			-	3. Ekonomi Mandiri	-	-	578.400.000,00	DINAS KOPERASI, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	350.000.000,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Ekonomi Mandiri	-		350.000.000,00	DINAS KOPERASI, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	228.400.000,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Ekonomi Mandiri	-		228.400.000,00	DINAS KOPERASI, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Barang milik daerah (BMD) penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara* *Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara*	-			30 BMD 30 unit	170.000.000,00			-	3. Ekonomi Mandiri	-	-	172.000.000,00	DINAS KOPERASI, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				30 Unit	120.000.000,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Ekonomi Mandiri	-		120.000.000,00	DINAS KOPERASI, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Unit	30.000.000,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Ekonomi Mandiri	-		30.000.000,00	DINAS KOPERASI, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				29 Unit	20.000.000,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Ekonomi Mandiri	-		22.000.000,00	DINAS KOPERASI, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
2.	**2.17.02**	**PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM**	***Persentase Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi yang dilayani***	-			**100 %**	**0,00**						-	**0,00**	
	2.17.02.2.01	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase izin usaha terselesaikan*	-			100 %	0,00			-	3. Ekonomi Mandiri	-	-	0,00	DINAS KOPERASI, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.02.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota															
			Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota				1 Unit Usaha	0,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	3. Ekonomi Mandiri	-		0,00	DINAS KOPERASI, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
3.	**2.17.03**	**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**	***Tingkat pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi***	-			**100 %**	**45.000.000,00**						-	**50.000.000,00**	
	2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	*Jumlah koperasi aktif Persentase koperasi yang diawasi*	-			436 unit 43.38 %	45.000.000,00			-	3. Ekonomi Mandiri	-	-	50.000.000,00	DINAS KOPERASI, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.03.2.01.0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan				295 Unit Usaha	45.000.000,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Ekonomi Mandiri	-		50.000.000,00	DINAS KOPERASI, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
4.	**2.17.04**	**PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI**	***Persentase Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam yang sehat***	-			**30,03 %**	**30.000.000,00**						-	**30.000.000,00**	
	2.17.04.2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Koperasi simpan pinjam/Unit simpan pinjam yang sehat*	-			87 unit	30.000.000,00			-	3. Ekonomi Mandiri	-	-	30.000.000,00	DINAS KOPERASI, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.04.2.01.0001	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan				290 Unit Usaha	30.000.000,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Ekonomi Mandiri	-		30.000.000,00	DINAS KOPERASI, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5.	**2.17.05**	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**	***Persentase SDM Koperasi terlatih***	-			**20,64 %**	**300.000.000,00**						-	**300.000.000,00**	
	2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah kegiatan yang dilaksanakan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota*	-			7 kegiatan 540 orang	300.000.000,00			-	3. Ekonomi Mandiri	-	-	300.000.000,00	DINAS KOPERASI, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.05.2.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi														
			Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian				540 Orang	300.000.000,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Ekonomi Mandiri	-		300.000.000,00	DINAS KOPERASI, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
6.	**2.17.07**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**	***Persentase Partisipasi Usaha Mikro***	-			**1,197 %**	**125.000.000,00**						-	**135.000.000,00**	
	2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	*Jumlah usaha mikro*	-			15037 usaha	125.000.000,00			-	3. Ekonomi Mandiri	-	-	135.000.000,00	DINAS KOPERASI, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.07.2.01.0002	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro														
			Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro				50 Unit Usaha	25.000.000,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Ekonomi Mandiri	-		30.000.000,00	DINAS KOPERASI, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.07.2.01.0003	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro														
			Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan				10 Unit Usaha	15.000.000,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Ekonomi Mandiri	-		15.000.000,00	DINAS KOPERASI, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.07.2.01.0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro														
			Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro				130 Unit Usaha	60.000.000,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Ekonomi Mandiri	-		65.000.000,00	DINAS KOPERASI, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.07.2.01.0014	Penyusunan Basis Data Usaha Mikro														
			Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata				375 Unit Usaha	25.000.000,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Ekonomi Mandiri	-		25.000.000,00	DINAS KOPERASI, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
7.	**2.17.08**	**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**	***Persentase Usaha Mikro yang berkembang menjadi Usaha Kecil***	-			**0,080 %**	**400.000.000,00**						-	**400.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	*Jumlah Usaha Mikro yang berkembang menjadi Usaha Kecil*	-			12 usaha	400.000.000,00			-	3. Ekonomi Mandiri	-	-	400.000.000,00	DINAS KOPERASI, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.08.2.01.0006	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi														
			Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi				300 Unit Usaha	400.000.000,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Ekonomi Mandiri	-		400.000.000,00	DINAS KOPERASI, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**3.511.226.573,32**							**3.365.262.379,83**	
	3.30	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**						**2.311.226.573,32**							**2.465.262.379,83**	
1.	**3.30.03**	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**	***Persentase Sarana Distribusi Perdagangan yang dikelola dengan baik***	-			**32,26 %**	**1.481.226.573,32**						-	**1.585.262.379,83**	
	3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	*Jumlah pasar rakyat yang direnovasi*	-			1 unit	1.401.226.573,32			-	3. Ekonomi Mandiri	-	-	1.505.262.379,83	DINAS KOPERASI, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.03.2.01.0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan														
			Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan				31 Unit	400.000.000,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Ekonomi Mandiri	-		500.000.000,00	DINAS KOPERASI, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.03.2.01.0002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan														
			Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan				10 Unit	1.001.226.573,32	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Ekonomi Mandiri	-		1.005.262.379,83	DINAS KOPERASI, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.03.2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	*Jumlah kegiatan pembinaan*	-			2 kegiatan	80.000.000,00			-	3. Ekonomi Mandiri	-	-	80.000.000,00	DINAS KOPERASI, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.03.2.02.0001	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan				2 Dokumen	80.000.000,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Ekonomi Mandiri	-		80.000.000,00	DINAS KOPERASI, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
2.	**3.30.04**	**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**	***Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting***	-			**27,81 %**	**60.000.000,00**						-	**70.000.000,00**	
	3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	*Jumlah kegiatan pengawasan pupuk* *Jumlah kegiatan stabilisasi harga*	-			2 kegiatan 2 kegiatan	50.000.000,00			-	3. Ekonomi Mandiri	-	-	60.000.000,00	DINAS KOPERASI, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.30.04.2.02.0002	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan														
			Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan				240 Laporan	30.000.000,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Ekonomi Mandiri	-		35.000.000,00	DINAS KOPERASI, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.04.2.02.0003	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				1 Laporan	20.000.000,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Ekonomi Mandiri	-		25.000.000,00	DINAS KOPERASI, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.04.2.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah kegiatan pengawasan pupuk*	-			2 kegiatan	10.000.000,00			-	3. Ekonomi Mandiri	-	-	10.000.000,00	DINAS KOPERASI, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.04.2.03.0002	Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi														
			Jumlah Laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi				1 Laporan	5.000.000,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Ekonomi Mandiri	-		5.000.000,00	DINAS KOPERASI, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.04.2.03.0003	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi														
			Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%				1 Laporan	5.000.000,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Ekonomi Mandiri	-		5.000.000,00	DINAS KOPERASI, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
3.	**3.30.05**	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR**	***Persentase Produk Ekspor Unggulan***	-			**100 %**	**275.000.000,00**						-	**300.000.000,00**	
	3.30.05.2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase keikutsertaan dalam event promosi*	-			100 %	275.000.000,00			-	3. Ekonomi Mandiri	-	-	300.000.000,00	DINAS KOPERASI, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.05.2.01.0002	Pameran Dagang Nasional														
			Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang				10 Pelaku Usaha	250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Ekonomi Mandiri	-		270.000.000,00	DINAS KOPERASI, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.05.2.01.0005	Peningkatan Citra Produk Ekspor														
			Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi				10 Produk	25.000.000,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Ekonomi Mandiri	-		30.000.000,00	DINAS KOPERASI, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4.	**3.30.06**	**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	***Persentase Pelaku Usaha yang memenuhi Uji Metrologi Legal*** ***Persentase Pelaku Usaha yang memenuhi Uji Metrologi Legal***	-			**100 %** **100 %**	**195.000.000,00**						-	**210.000.000,00**	
	3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	*Jumlah kegiatan yang dilaksanakan* *Jumlah kegiatan yang dilaksanakan*	-			2 kegiatan 2 kegiatan	195.000.000,00			-	3. Ekonomi Mandiri	-	-	210.000.000,00	DINAS KOPERASI, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.06.2.01.0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang														
			Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang				1200 Unit	170.000.000,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Ekonomi Mandiri	-		160.000.000,00	DINAS KOPERASI, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.06.2.01.0002	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal														
			Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina				20 Orang	25.000.000,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Ekonomi Mandiri	-		30.000.000,00	DINAS KOPERASI, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
5.	**3.30.07**	**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**	***Cakupan Fasilitasi Pemasaran Produk Lokal***	-			**100 %**	**300.000.000,00**						-	**300.000.000,00**	
	3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	*Jumlah kegiatan yang dilaksanakan*	-			1 kegiatan	300.000.000,00			-	3. Ekonomi Mandiri	-	-	300.000.000,00	DINAS KOPERASI, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.07.2.01.0005	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota														
			Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota				25 UMKM	300.000.000,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Ekonomi Mandiri	-		300.000.000,00	DINAS KOPERASI, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.31	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**						**1.200.000.000,00**							**900.000.000,00**	
1.	**3.31.02**	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	***Pertumbuhan industri baru***	-			**0,0192 %**	**1.100.000.000,00**						-	**800.000.000,00**	
	3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	*Jumlah kegiatan penyusunan rencana pembangunan industri*	-			3 kegiatan	1.100.000.000,00			-	3. Ekonomi Mandiri	-	-	800.000.000,00	DINAS KOPERASI, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.31.02.2.01.0001	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri				1 Dokumen	300.000.000,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Ekonomi Mandiri	-		0,00	DINAS KOPERASI, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.31.02.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri				3 Dokumen	300.000.000,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Ekonomi Mandiri	-		300.000.000,00	DINAS KOPERASI, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.31.02.2.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri				12 Dokumen	450.000.000,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Ekonomi Mandiri	-		450.000.000,00	DINAS KOPERASI, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.31.02.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat				1 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Ekonomi Mandiri	-		50.000.000,00	DINAS KOPERASI, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
2.	**3.31.03**	**PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI**	***Persentase perizinan usaha industri***	-			**100 %**	**50.000.000,00**						-	**50.000.000,00**	
	3.31.03.2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah izin usaha yang terbit*	-			10 izin	50.000.000,00			-	3. Ekonomi Mandiri	-	-	50.000.000,00	DINAS KOPERASI, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.31.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat				10 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Ekonomi Mandiri	-		50.000.000,00	DINAS KOPERASI, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
3.	**3.31.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL**	***Cakupan layanan sistem informasi industri nasional***	-			**21 %**	**50.000.000,00**						-	**50.000.000,00**	
	3.31.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah kegiatan penyediaan data informasi industri*	-			1 kegiatan	50.000.000,00			-	3. Ekonomi Mandiri	-	-	50.000.000,00	DINAS KOPERASI, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.31.04.2.01.0001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)				1 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Ekonomi Mandiri	-		50.000.000,00	DINAS KOPERASI, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	JUMLAH							**10.404.751.537,32**							**10.151.893.593,83**	

REALISASI FISIK DAN KEUANGAN TAHUN ANGGRAN 2022
DINAS KOPERASI, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN ASAHAN

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD PENGELOLA	Dana Menurut APBD (RP)	REALISASI			
			Fisik		Keuangan	
			Volume	%	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7
I	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	***6.065.874.718***			***5.635.979.533***	***92,91***
	A. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**30.310.700**			**24.024.900**	
	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.310.800	3 dok	100	9.052.800	87,80
	2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	19.999.900	23 laporan	100	14.972.100	74,86
	B. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**4.959.204.937**	**12 bulan**		**4.577.830.580**	
	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.959.204.937	12 bulan	100	4.577.830.580	92,31
	C. Administrasi Umum Perangkat Daerah	**202.203.507**			**202.119.398**	
	1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	6.101.475	1 paket	100	6.101.475	100
	2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	35.000.313	1 paket	100	35.000.289	100
	3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	25.002.500	1 paket	100	25.002.500	100
	4. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	20.000.000	1 paket	100	19.932.125	99,66
	5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	19.557.000	1 paket	100	19.557.000	100
	6. Penyediaan Bahan/Material	11.414.219	1 paket	100	11.414.219	100
	7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	85.128.000	1 laporan	100	85.111.790	99,98
	D. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**114.155.000**			**113.996.000**	
	1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	114.155.000	13 unit	100	113.996.000	99,86
	E. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**620.359.274**			**578.648.196**	
	1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	379.559.614	1 laporan	100	337.848.536	89,01
	2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	240.799.660	1 laporan	100	240.799.660	100
	F. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**139.641.300**			**139.360.459**	
	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	89.991.300	30 unit	100	89.710.459	99,69
	2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan Lainnya	30.000.000	2 unit	100	30.000.000	100
	3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	19.650.000	29 unit	100	19.650.000	100
II	**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**	***50.000.025***			***49.066.025***	***98***
	A. Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	**50.000.025**			**49.066.025**	
	1. Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, Serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	50.000.025	313 unit usaha	100	49.066.025	98,13
II	**PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI**	***40.001.000***			***39.304.000***	***98,26***
	A. **Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya Dalam Satu Daerah Kabupaten/Kota**	**40.001.000**			**39.304.000**	
	1. Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	40.001.000	87 unit	100	39.304.000	98,26
IV	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**	***236.026.775***			***229.356.275***	***97,17***
	A. **Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**236.026.775**			**229.356.275**	
	1. Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	236.026.775	50 orang	100	229.356.275	97,17

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD PENGELOLA	Dana Menurut APBD (RP)	REALISASI			
			Fisik		Keuangan	
			Volume	%	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7
V	**V PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**	***134.500.000***			***134.019.625***	***99,64***
	A **Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan**	**134.500.000**			**134.019.625**	
	1. Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	30.000.000	25 unit usah	100	29.519.625	98,40
	2. Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	25.000.000	25 unit usah	100	25.000.000	100
	3. Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	79.500.000	00 unit usah	125	79.500.000	100
VI	**VI PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**	***190.005.110***			***189.955.110***	***100***
	A. **Pengembangan Usaha Mikro Dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil**	**190.005.110**			**189.955.110**	
	1. Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	190.005.110	180 orang	100	189.955.110	99,97
VII	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**	***1.199.165.022***			***1.150.556.717***	***95,95***
	A. **Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan**	**1.139.128.772**			**1.090.529.267**	
	1. Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	200.000.000	1 dok	100	162.504.000	81,25
	2. Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	939.128.772	10 unit	100	928.025.267	98,82
	B. **Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya**	**60.036.250**			**60.027.450**	
	1. Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	60.036.250	1 dok	100	60.027.450	99,99
VIII	**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**	***344.992.888***			***267.726.906***	***77,60***
	A. **Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota**	**344.992.888**			**267.726.906**	
	1. Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1	44.999.500	240 laporan	120	44.574.700	99,06
	2. Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak alam 1 (satu) Kabupaten/Kota	299.993.388	1 laporan	100	223.152.206	74,39
IX	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR**	***115.000.125***			***112.491.633***	***97,82***
	A. **Penyelenggaraan Promosi dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan Yang Terdapat Pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**115.000.125**			**112.491.633**	
	1. Pameran Dagang Nasional	65.000.000	1 dok	100	64.217.108	98,80
	2. Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	50.000.125	25 oprang	100	48.274.525	96,55
X	**PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	***119.999.969***			***109.751.660***	***91,46***
	A **Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan**	**119.999.969**			**109.751.660**	
	1. Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang	119.999.969	1200 unit	108	109.751.660	91,46
XI	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	***404.867.725***			***399.299.755***	***98,62***
	A **Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota**	**404.867.725**			**399.299.755**	

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD PENGELOLA	Dana Menurut APBD (RP)	REALISASI			
			Fisik		Keuangan	
			Volume	%	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7
	1. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	115.000.000	3 dok	100	111.438.000	96,90
	2. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	90.000.000	1 dok	100	89.999.000	100
	3. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	199.867.725	1 dok	100	197.862.755	99,00
	JUMLAH SELURUHNYA	**8.900.433.357**			**8.317.507.239**	**93,45**